

RENJA

(RENCANA KERJA)
TAHUN 2015



BIRO PEMERINTAHAN

SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAMBI



RENJA
RENCANA KERJA TAHUN 2015

BIRO PEMERINTAHAN

SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAMBI

BAB I PENDAHULUAN

Undang Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU-SPPN) yang telah dijabarkan secara teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menyatakan bahwa salah satu tahap yang harus dilalui dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah adalah penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Penyusunan rancangan Renja dilakukan dengan melaksanakan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi riil pada Biro Pemerintahan, evaluasi pelaksanaan Renja Biro Pemerintahan tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Biro Pemerintahan. Dari evaluasi tersebut dapat direncanakan antisipasi terhadap pelaksanaan program di masa yang akan datang agar dapat disusun secara terpadu guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja SKPD yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup:

1. Tahap perumusan rancangan Renja SKPD.
2. Tahap penyajian rancangan Renja SKPD.

Rencana Kerja Biro Pemerintahan Tahun Anggaran 2015 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya. Dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Biro Pemerintahan Tahun Anggaran 2015, mengacu kepada rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD Provinsi Jambi Tahun 2015. Untuk penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja Biro Pemerintahan, selaras dengan Renstra Biro Pemerintahan Tahun 2010-2015. Selanjutnya Renja Biro Pemerintahan Tahun 2015 dijadikan salah satu bahan dalam penyusunan RKPD Provinsi Jambi Tahun 2015 yang

menjadi dasar dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2015.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar atau landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Biro Pemerintahan Tahun Anggaran 2015 ini, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 ;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tatakerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 Nomor 5).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015 adalah untuk mengetahui :

1. Program dan kegiatan Biro Pemerintahan Tahun 2015.
2. Lokasi pelaksanaan program dan kegiatan Biro Pemerintahan Tahun 2015.
3. Indikator kinerja Biro Pemerintahan Tahun 2015.
4. Kelompok sasaran Biro Pemerintahan Tahun 2015.
5. Pagu indikatif program dan kegiatan Biro Pemerintahan Tahun Anggaran 2015.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Merencanakan program dan kegiatan Biro Pemerintahan Tahun 2015.
2. Mengevaluasi Renja Biro Pemerintahan Tahun sebelumnya.
3. Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Biro Pemerintahan Tahun sebelumnya.
4. Perumusan tujuan dan sasaran Biro Pemerintahan Tahun 2015.
5. Sebagai salah satu media pertanggung jawaban melalui penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

1.4. Sistematika Penulisan Renja

Rencana Kerja Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BIRO PEMERINTAHAN

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Biro Pemerintahan tahun 2013 dan capaian Renstra Biro Pemerintahan
- 2.2 Rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015

BAB III. PENUTUP
LAMPIRAN

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BIRO PEMERINTAHAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu (2013) dan Capaian Renstra

Berdasarkan program dan kegiatan yang ada, Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jambi telah melaksanakan sejumlah kegiatan melalui program yang ada dengan dana APBD Tahun 2013 termasuk Perubahan Anggaran yaitu **sebesar Rp. 3.861.657.000,- dan serapan keuangan sebesar Rp. 3.446.895.985,- atau 89,26 % dan pada APBD Murni Tahun 2014 sebesar 3.861.657.000,- dan serapan keuangan APBD Murni Tahun 2014 per Agustus 2014 sebesar Rp. 1.234.151.600,- atau sebesar 31,9 %.**

Adapun rincian dari realisasi anggaran Tahun 2013 dapat kami jabarkan di bawah ini, tetapi untuk realisasi Tahun Anggaran 2014 kami sajikan hanya pagu anggaran yang tersedia dan dapat dijabarkan sebagai berikut :

A. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

1. Kegiatan Rapat Kerja Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia

Masukan input Tahun 2013 berupa dana Rp.193.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 96.001.500,- (49,74 %), dengan pelaksanaan sebagai berikut :

Keg. realisasi belanja akomodasi dan konsumsi untuk membayar belanja hotel dan konsumsi yang belum terbayarkan pada pelaksanaan Rapat APPSI Tahun 2012 karena berkas dokumen proses LS dengan pihak hotel (Hotel Novita) belum selesai sampai tanggal 28 Desember 2012 (limit). Sehingga dianggarkan pada APBDP 2013 (sebagai Hutang Biro Keuangan/BUD).

Sedang pada APBD Murni Tahun 2014 dana sebesar Rp. 198.249.300,-

Tujuan dari pelaksanaan Raker APPSI ialah untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang saling membangun antara seluruh Pemerintah Provinsi yang ada di Indonesia guna mencapai sinergisitas pembangunan nasional.

B. Program Pengembangan Batas Wilayah

1. Kegiatan Pembinaan dan Bimbingan Teknis Pembakuan Nama Rupa Bumi

Masukan input Tahun 2013 berupa dana Rp.130.919.750,- dengan realisasi keuangan Rp.130.308.450,- (99,30%), sedang pada APBD Murni Tahun 2014 sebesar Rp. 169.403.250,-.

Output kegiatan ini adalah :

- Terlaksananya Bimbingan Teknis Pembakuan Nama Rupa Bumi
- Terlaksananya pembinaan nama Rupa Bumi.

Outcome dari kegiatan ini adalah :

- Meningkatnya pengetahuan aparatur dalam menetapkan nama Rupa Bumi
- Tertibnya pemberian nama Rupa Bumi agar terhindar dari penamaan ganda.

2. Kegiatan penataan batas antara Provinsi Jambi dengan Provinsi Tetangga

Masukan input berupa dana termasuk Perubahan Tahun 2013 Anggaran sebesar Rp.355.439.500,-. Realisasi keuangan sebesar Rp.329.754.150,- (92,77 %) dan pada APBD Murni Tahun 2014 sebesar Rp. 436.690.750,-

Output kegiatan :

- Pembinaan, pemantauan dan koordinasi pelaksanaan penataan batas wilayah Provinsi dengan Provinsi berbatasan.

Outcome kegiatan :

Terwujudnya penataan batas wilayah provinsi dengan provinsi lain yang baik.

3. Kegiatan fasilitasi Penyelesaian Batas antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi

Masukan Input berupa dana APBD 2013 Rp.244.959.500,- dengan realisasi keuangan Rp.225.193.250,- (91,93 %) dan pada APBD Tahun 2014 sebesar Rp. 454.353.500,-

Output kegiatan :

- Terfasilitasinya penyelesaian batas antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.

Outcome kegiatan :

Tercipta dan terbinanya tertib penetapan batas antar Kabupaten/Kota.

4. Kegiatan Rapat koordinasi kerjasama di wilayah perbatasan.

Masukan input berupa dana APBD Tahun 2013 Rp.106.535.250,- dan realisasi keuangan Rp.105.834.150,- (99,34%) dan APBD Murni Tahun 2014 input dana sebesar Rp. 131.535.250,-

Output kegiatan :

- Terlaksananya Rakor kerjasama di wilayah perbatasan.

Outcome kegiatan :

- Meningkatnya kesiapan wilayah berbatasan untuk bekerjasama.

C. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintahan dan OTDA di Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Kesatuan bangsa.

1. Kegiatan Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Penanganan Masalah Tramtib.

Masukan Input berupa dana APBD Tahun 2013 Rp.127.706.500,- dengan realisasi keuangan Rp.127.706.500,- (100 %) dan pada APBD Murni Tahun 2014 sebesar Rp. 127.706.500,-

Output kegiatan :

- Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penanganan masalah tramtib.

Outcome kegiatan :

- Terciptanya hubungan sosial kemasyarakatan yang harmonis dan kondusif bagi terlaksananya pembangunan.

2. Kegiatan Bintek PPAT bagi para Camat dalam Provinsi Jambi

Masukan input berupa dana Tahun 2013 Rp.47.766.500,- dengan realisasi Rp.47.766.500,- (100%) dan pada APBD Murni Tahun 2014 sebesar Rp.53.060.500,-

Output kegiatan :

Terlaksananya Bintek PPAT bagi para Camat dalam Provinsi Jambi Tahun 2012.

Outcome kegiatan :

- Meningkatnya kapasitas aparatur Camat.

3. Kegiatan Pengelolaan operasional Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)

Masukan input berupa dana Tahun 2013 Rp.54.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp.53.542.050,- (99,15 %) dan APBD Murni Tahun 2014 sebesar Rp. 78.646.250,-

Output kegiatan :

Terlaksananya kegiatan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)

Outcome kegiatan :

Berjalannya kegiatan pengelolaan SIAK dengan baik.

4. Kegiatan Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Capil serta Bimbingan Teknis Sistem Administrasi Kependudukan (SAK)

Masukan input pada APBD Tahun 2013 berupa dana Rp. 98.564.800,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 98.194.800,- (99,62 %) dan pada APBD Murni Tahun 2014 sebesar Rp. 88.790.800,-

Output kegiatan :

- Terbinanya Administrasi Kependudukan dan Capil
- Terlaksananya Bimbingan Teknis Sistem Administrasi Kependudukan (SAK).

Outcome kegiatan :

- Terciptanya suasana yang kondusif untuk pengembangan SAK
- Meningkatnya kapasitas aparatur SAK.

5. Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan di Kecamatan dan Penilaian Camat Teladan/Berprestasi dalam Provinsi Jambi

Masukan Input berupa dana APBD Tahun 2013 sebesar Rp.239.400.000,- dengan realisasi keuangan sejumlah Rp.239.594.000,- (98,83 %) dan APBD Murni Tahun 2014 sebesar Rp. 265.892.800,-

Output kegiatan :

- Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan Tugas Umum Pemerintahan di Kecamatan.
- Terlaksananya Penilaian Camat Teladan

Outcome kegiatan :

- Meningkatnya pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan di Kelurahan
- Meningkatnya Motivasi para Camat untuk meningkatkan kinerjanya.

6. Kegiatan Penyusunan/Penghimpunan LPPD Provinsi Jambi, Kab./Kota se- Provinsi Jambi dan Sosialisasi Penyusunan LPPD

Masukan input berupa dana APBD Tahun 2013 sebesar Rp.316.375.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.241.700.000,- (76,40 %) dan pada APBD Murni Tahun 2014 sebesar Rp. 542.261.000,-

Output kegiatan :

- Terbitnya LPPD Provinsi Jambi dan Kab./Kota se-Provinsi Jambi.
- Terlaksananya sosialisasi penyusunan LPPD.

Outcome :

- Meningkatnya kualitas evaluasi Pelaksanaan Pembangunan se-Provinsi Jambi.
- Meningkatnya kapasitas aparatur penyusun LPPD.

7. Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintahan di Daerah)

Masukan input berupa dana APBD Tahun 2013 dan Tahun 2014 sebesar Rp. 0.

Output kegiatan :

Terlaksananya Pembinaan Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Outcome kegiatan :

Meningkatnya Penyelenggaraan DKTP se-Provinsi Jambi.

8. Kegiatan Fasilitasi Administrasi di Bidang Pemerintahan / Penyusunan Program dan laporan biro serta dukungan terhadap tugas umum bidang pemerintahan.

Masukan input berupa dana pada APBD Tahun 2013 Rp.802.686.000,- dengan realisasi keuangan Rp.796.505.310,- (99,23 %) dan pada APBD Murni Tahun 2014 sebesar Rp. 118.019.300,-

Output kegiatan :

Terlaksananya Fasilitasi Administrasi di Bidang Pemerintahan

Outcome kegiatan :

Terdukungnya pelaksanaan tugas-tugas pada Biro Pemerintahan.

9. Kegiatan penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)

Masukan input berupa dana APBD Tahun 2013 sebesar Rp. 138.500.000,- dengan realisasi keuangan sejumlah Rp.136.147.700,- (98,30%) dan pada APBD Murni Tahun 2014 sebesar Rp. 118.500.000,-

Output kegiatan :

Terbitnya e-KTP bagi penduduk se-Provinsi Jambi.

Outcome kegiatan :

Membaiknya kualitas pendataan penduduk dan pelayanan publik.

10. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemilukada Kab./Kota dalam Provinsi Jambi

Masukan input berupa dana APBD Tahun 2013 sebesar Rp. 108.945.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.101.335.100,- (93,01 %)

Output kegiatan :

Terlaksananya Dokumentasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemilukada Kab./Kota dalam Provinsi Jambi

Outcome kegiatan :

Meningkatnya kualitas pendataan Pemilukada se-Provinsi Jambi.

11. Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Kunjungan Kerja Pejabat Daerah dan Pejabat Negara/Lemhannas/Sesko ke Provinsi Jambi.

Masukan input berupa dana APBD Tahun 2013 sebesar Rp. 77.355.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.73.881.900,- (84,8500%)

Output kegiatan :

Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Kerja pejabat pusat/daerah lain ke Provinsi Jambi

Outcome kegiatan :

Meningkatnya koordinasi dan konsolidasi pembangunan.

12. Kegiatan Konsultasi dan fasilitasi pelayanan urusan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah, dan DPRD serta DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi

Masukan input berupa dana pada APBD Tahun 2013 sebesar Rp.114.545.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.109.172.450,- (95,32 %) dan pada APBD Murni Tahun 2014 sebesar Rp. 269.239.500,-

Output kegiatan :

Terselenggaranya kegiatan konsultasi dan fasilitasi pelayanan urusan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah dan DPRD serta DPRD Kabupaten/Kota.

Outcome kegiatan :

Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan urusan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah dan DPRD Provinsi serta DPRD Kab/Kota..

13. Kegiatan Pemantauan Penyelenggaraan Pemerintahan Bawahan dan Rapat Koordinasi Pemerintahan Bawahan

Masukan input berupa dana sebesar Rp.90.100.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.88.775.750,- (98,53 %)

Output kegiatan :

Terlaksananya Pemantauan Penyelenggaraan Pemerintahan Bawahan dan Rapat Koordinasi Pemerintahan Bawahan

Outcome kegiatan :

Meningkatnya koordinasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan bawahan.

D. Program Penataan Administrasi Kependudukan

1. Kegiatan Rapat Koordinasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi.

Masukan input berupa dana sebesar Rp.47.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.35.535.050,- (75,61 %)

Output kegiatan :

Terlaksananya Penataan Administrasi Kependudukan

Outcome kegiatan :

Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Dalam pelaksanaannya, baik program dan kegiatan tidak terlepas dari adanya hambatan-hambatan baik internal maupun eksternal yang ditemui seperti :

1. Masih belum optimalnya pengetahuan dan keterampilan para pengelola keuangan terhadap mekanisme pengelolaan keuangan. Sehingga tindakan antisipatif untuk menghadapi berbagai kemungkinan tidak dapat diambil secara efektif dan efisien .
2. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur sehingga keseimbangan beban tugas menjadi tidak merata.
3. Masih kurangnya koordinasi berbagai instansi terkait, sehingga kelancaran informasi pembangunan menjadi terhambat.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jambi melakukan upaya pembinaan dan peningkatan intensitas koordinasi, kebijakan penganggaran, serta pembenahan sumber daya manusia di lingkungan Biro Pemerintahan baik melalui diklat ataupun mengusulkan penambahan aparatur sesuai dengan bidang tugas yang dibutuhkan.

2.2. Rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015

Untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan dan dirumuskan dalam Program Kerja sebagai pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Biro Pemerintahan, direncanakan akan dilaksanakan 6 (enam) Program dengan 20 (dua puluh) Kegiatan dengan total alokasi dana sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2015 ialah sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah). Program-program dan kegiatan-kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan pada Tahun 2015 antara lain sebagai berikut :

A. Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah

1) Kegiatan Rapat Kerja Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp. 128.861.300,-, bertujuan untuk meningkatkan sinergitas antar provinsi dan menciptakan hubungan yang harmonis antar provinsi dan pemerintah Pusat. Indikator Kinerjanya adalah penyelenggaraan kegiatan Raker APPSI.

2) Kegiatan Rapat Koordinasi Kerjasama di Wilayah Perbatasan

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp. 85.508.000,- bertujuan untuk meningkatkan sinergitas antar provinsi dan menciptakan hubungan dan kerjasama yang harmonis antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi dan antar Provinsi Jambi dengan Provinsi Tetangga khususnya di wilayah perbatasan. Indikator Kinerjanya adalah terselenggaranya Rakor Kerjasama di Wilayah Perbatasan.

B. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.

1) Kegiatan Pembinaan dan Bimbingan Teknis Pembakuan Nama Rupabumi

Pagu untuk kegiatan ini sebesar Rp.110.162.000,-, dengan sasaran strategis mewujudkan tertib administrasi di bidang pembakuan nama rupa bumi, dan Indikator Kinerjanya adalah persentase pelaksanaan kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis pembakuan nama Rupabumi di Provinsi Jambi

2) Kegiatan Penataan Batas antara Provinsi Jambi dengan Provinsi Tetangga

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mencegah terjadinya konflik di daerah perbatasan dan tertatanya kode wilayah administratif pemerintahan. Dana yang dianggarkan sebesar Rp.333.810.000,- dengan Indikator Kinerja adanya laporan kegiatan penataan batas dengan provinsi tetangga, terpeliharanya gapura batas dan adanya peta batas antar provinsi.

3) Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Batas antar Kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi

Tujuan kegiatan ini adalah juga untuk mencegah terjadinya konflik di daerah perbatasan antar kota/kabupaten dalam provinsi, dan tertatanya kode wilayah administratif pemerintahan. Indikator Kinerja yaitu terlaksananya Rakor Fasilitasi Masalah Batas dan Pencapaian Kesepakatan Batas antar Kabupaten/kota. Pagu dana yang disediakan adalah Rp.318.047.450,-.

4) Kegiatan Persiapan Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan umum.

Kegiatan ini bertujuan untuk tercapainya pembinaan, sosialisasi peraturan dan petunjuk teknis urusan pertanahan. Anggaran kegiatan ini Rp.232.169.730,-.

C. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintahan dan OTDA di Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Kesatuan Bangsa.

1) Kegiatan Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Penanganan Masalah Trantib

Sasaran strategisnya yaitu mewujudkan koordinasi penanganan masalah ketentraman dan ketertiban di kab/kota se-provinsi Jambi. Anggaran yang disediakan Rp.89.394.550,- dengan Indikator Kinerja jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan aparat trantib.

2) Kegiatan Pemantauan Penyelenggaraan Pemilukada dalam Provinsi Jambi

Tujuan kegiatan ini yaitu meningkatnya akurasi data dan informasi penyelenggaraan Pemilukada di Provinsi Jambi. Dana yang dipersiapkan untuk ini sebesar Rp.136.400.000,-. Indikator kinerjanya ialah jumlah dokumentasi dan evaluasi penyelenggaraan Pemilukada tahun 2015.

3) Koordinasi dan fasilitasi Kunjungan Kerja Pejabat Daerah dan Pejabat Negara/Lemhanas/Sesko ke Provinsi Jambi.

Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudnya peningkatan kualitas pelayanan dan koordinasi kunjungan kerja Pejabat Daerah dan Pejabat Negara. Anggaran kegiatan ini Rp.54.148.500,-. Indikator kinerjanya terselenggaranya koordinasi dan fasilitasi kunjungan kerja pejabat daerah dan pejabat negara ke Provinsi Jambi.

4) Kegiatan Konsultasi dan Fasilitasi Pelayanan Urusan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan DPRD Provinsi Jambi serta DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi.

Tujuan kegiatan ini untuk mewujudkan peningkatan kualitas urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota. Dengan anggaran Rp.188.467.650,- dengan indikator kinerja berupa terselenggaranya kegiatan konsultasi dan fasilitasi pelayanan urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan DPRD serta DPRD Kabupaten/Kota.

D. Program Penataan Administrasi Kependudukan

1) Kegiatan Rapat Koordinasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/kota se-Provinsi Jambi

Tujuan kegiatan ini untuk mengevaluasi kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang diselenggarakan oleh kabupaten/kota. Dana yang tersedia Rp.52.132.352,- dengan indikator kinerja jumlah rapat koordinasi kependudukan dan catatan sipil selama tahun 2015.

2) Kegiatan Pengelolaan Operasional Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)

Tujuan kegiatan ini adalah meningkatnya penguasaan pengelolaan Operasional Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) on line/ offline kabupaten/kota se-Provinsi Jambi, dengan pagu anggaran sebesar Rp.59.984.688,- dengan indikator kinerja persentase kegiatan operasional Sistem informasi administrasi kependudukan.

3) Kegiatan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)

Sasarannya adalah mewujudkan penerapan e-KTP di Provinsi Jambi. Dengan dana senilai Rp.88.875.000,- dengan indikator kinerja yaitu jumlah pelaksanaan supervisi, monitoring dan evaluasi penerapan KTP elektronik di Provinsi Jambi.

4) Kegiatan pembinaan administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta Sistem Administrasi Kependudukan (SAK)

Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang diselenggarakan oleh kabupaten/kota se-Provinsi Jambi. Dana yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp.137.687.563,-

E. Program Penerapan Pemerintahan yang Baik.

1) Kegiatan Penyusunan/Penghimpunan LPPD Provinsi Jambi, Kab/Kota se-Provinsi Jambi dan Sosialisasi penyusunan LPPD

Bertujuan untuk meningkatkan informasi kinerja pemerintah daerah melalui LPPD dan IKK. Dana kegiatan sebesar Rp.379.583.000,- dengan indikator kinerja berupa persentase terlaksananya kegiatan penyusunan/penghimpunan LPPD Provinsi Jambi, Kabupaten/kota se-Provinsi Jambi.

2) Kegiatan Penyusunan Program dan Laporan Biro serta Dukungan terhadap Tugas Umum Bidang Pemerintahan.

Sasaran strategis kegiatan ini yaitu meningkatnya tertib system ketatausahaan dan administrasi sebagai salah satu daya dukung penyelenggaraan Pemerintahan. Anggaran kegiatan ini sebesar Rp.181.899.067,- termasuk didalamnya biaya perjalanan dinas luar daerah yang mendukung kelancaran semua urusan pemerintahan. Indikator kinerja kegiatan ini berupa persentase serapan dana untuk pelaksanaan urusan ketata usahaan dan memberikan pelayanan teknis dan administrasi di bidang kepegawaian, umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

3) Pemantauan Penyelenggaraan Pemerintah Bawahan dan Rapat Koordinasi Pemerintahan Bawahan

Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi Pemerintahan desa. Anggaran kegiatan ini Rp.78.640.000,-. Indikator kinerjanya persentase terselenggaranya rakor pemerintahan bawahan yang diadakan di kecamatan.

4) Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan di Kecamatan dan Penilaian Camat Teladan/Berprestasi dalam Provinsi Jambi

Tujuannya adalah untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan tugas umum pemerintahan pada pemerintahan kecamatan sehingga pemerintah kecamatan bisa berjalan dengan baik. Anggaran kegiatan sebesar Rp.206.124.000,-, dengan indikator kinerja terlaksananya pembinaan kecamatan, rakor camat dan penilaian camat teladan/berprestasi.

5) Kegiatan Peran Gubernur selaku Wakil Pemerintah di Daerah

Dengan pagu anggaran sebesar Rp.54.000.000,-, bertujuan untuk meningkatkan dan mengefektifkan secara maksimal peran Gubernur selaku Wakil Pemerintah di Daerah..

F. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

1) Kegiatan Fasilitasi Penanganan Sengketa Tanah

Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi penanganan sengketa tanah di Provinsi Jambi. Anggaran kegiatan ini Rp.132.410.000,-. Indikator kinerjanya terselesaikannya konflik sengketa tanah di Provinsi Jambi.

BAB 3 P E N U T U P

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja-SKPD disusun dengan mempedomani Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), diantaranya memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2015 ini merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawab biro, dan diharapkan dapat memberikan solusi dalam setiap gerak dan langkah yang akan ditempuh, agar tidak terjadinya berbagai hambatan. Rencana Kerja ini secara umum menguraikan program dan kegiatan Biro Pemerintahan serta indikator kinerja untuk program yang dinyatakan dalam sasaran hasil (*outcomes*).

Esensinya, dengan mempedomani Rencana Kerja ini dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagaimana telah tertuang dalam DPA-SKPD Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jambi, diharapkan Tupoksi Biro Pemerintahan dapat terlaksana dalam upaya meningkatkan kinerja SKPD, terutama dalam mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota khususnya dan dapat mendukung pencapaian Jambi Emas Tahun 2015.

**KEPALA BIRO PEMERINTAHAN
SETDA PROVINSI JAMBI**

YAZIRMAN, SE, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.19600222 199003 1 002



RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BIRO PEMERINTAHAN TAHUN 2015

NO	KODE PROGRAM DAN KEGIATAN	URAIAN	LOKASI	TARGET KINERJA	SUMBER DANA	RENCANA ANGGARAN 2015
I	1.20 . 1.20.03 . 10	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah				214.369.300
1	1.20.1.20.3.71.01	Kegiatan Rapat Kerja Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia	Provinsi Jambi	100 %	APBD Prov. Jambi	128.861.300
2	1.20.1.20.3.71.02	Kegiatan Rapat Koordinasi Kerja Sama di Wilayah Perbatasan	Provinsi Jambi	100 %	APBD Prov. Jambi	85.508.000
II	1.20.1.20.3.70	PROGRAM PENERAPAN KEPERINTAHAN YANG BAIK			0	900.246.067
1	1.20.1.20.3.70.01	Kegiatan Penyusunan/penghimpunan LPPD Prov. Jambi, Kab/Kota se-Provinsi Jambi dan Sosialisasi Penyusunan LPPD	Provinsi Jambi	100 %	APBD Prov. Jambi	379.583.000
2	1.20.1.20.3.70.04	Fasilitasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan di Kecamatan dan Rakor Camat serta Penilaian Camat Teladan	Provinsi Jambi	100 %	APBD Prov. Jambi	206.124.000
3	1.20.1.20.3.70.03	Kegiatan Pemantauan Penyelenggaraan Pemerintah Bawahan dan Rapat Koordinasi Pemerintahan Bawahan	Provinsi Jambi	100 %	APBD Prov. Jambi	78.640.000
4	1.20.1.20.3.70.05	Kegiatan Peningkatan Peran Gubernur selaku Wakil Pemerintah di Daerah	Provinsi Jambi	100 %	APBD Prov. Jambi	54.000.000
5	1.20.1.20.3.70.02	Kegiatan Penyusunan Program dan Laporan Biro Serta Dukungan Terhadap Tugas Umum Bidang Pemerintahan	Provinsi Jambi	100 %	APBD Prov. Jambi	181.899.067
III	1.20.1.20.3.27.	PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH				994.189.180
1	1.20.1.20.3.27.01	Kegiatan Persiapan Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	Provinsi Jambi	100 %	APBD Prov. Jambi	232.169.730
2	1.20.1.20.3.27.03	Kegiatan Penataan Batas-batas Antara Provinsi Jambi dengan Provinsi Tetangga	Provinsi Jambi	100 %	APBD Prov. Jambi	333.810.000

NO	KODE PROGRAM DAN KEGIATAN	URAIAN	LOKASI	TARGET KINERJA	SUMBER DANA	RENCANA ANGGARAN 2015
3	1.20.1.20.3.27.04	Kegiatan Penataan Batas Antar Kab/Kota Dalam Provinsi Jambi	Provinsi Jambi	100 %	APBD Prov. Jambi	318.047.450
4	1.20.1.20.3.27.02	Kegiatan Pembinaan dan Bimbingan Teknis Pembakuan Nama Rupabumi	Provinsi Jambi	100 %	APBD Prov. Jambi	110.162.000
IV	1.20.1.20.3.73	PROGRAM PENYELESAIN KONFLIK-KONFLIK SENGKETA PERTANAHAN				85.105.150
1	1.20.1.20.3.73.01	Kegiatan Fasilitasi Penanganan Sengketa Tanah	Provinsi Jambi	100 %	APBD Prov. Jambi	85.105.150
V	1.20.1.20.3.33	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintahan dan OTDA di Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Kesatuan Bangsa				468.410.700
1	1.20.1.20.3.33.02	Kegiatan Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan, Penanganan Masalah Trantib	Provinsi Jambi	100 %	APBD Prov. Jambi	89.394.550
2	1.20.1.20.3.33.22	Pemantauan penyelenggaraan Pemilukada	Provinsi Jambi	100 %	APBD Prov. Jambi	136.400.000
3	1.20.1.20.3.33.23	Koordinasi dan Fasilitasi Kunjungan Kerja Pejabat Daerah dan Pejabat Negara	Provinsi Jambi	100 %	APBD Prov. Jambi	54.148.500
4	1.20.1.20.3.33.24	Kegiatan Konsultasi dan Fasilitasi Pelayanan Urusan Kedinasan Kepala Daerah dan DPRD	Provinsi Jambi	100 %	APBD Prov. Jambi	188.467.650
VI	1.20.1.20.3.51.	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				337.679.576
1	1.20.1.20.3.51.02	Kegiatan Pengelolaan operasional sistem informasi administasi kependudukan (SIK)	Provinsi Jambi	100 %	APBD Prov. Jambi	58.984.688
2	1.20.1.20.3.51.03	Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)	Provinsi Jambi	100 %	APBD Prov. Jambi	88.875.000
3	1.20.1.20.3.51.01	Kegiatan Rapat koordinasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota	Provinsi Jambi	100 %	APBD Prov. Jambi	52.132.352

NO	KODE PROGRAM DAN KEGIATAN	URAIAN	LOKASI	TARGET KINERJA	SUMBER DANA	RENCANA ANGGARAN 2015
4	1.20.1.20.3.51.04	Kegiatan Pembinaan Administrasi kependudukan dan Catatan Sipil serta Sistem Administrasi Kependudukan (SAK), dan Rapat Koordinasi Penyerasian Catatan Sipil	Provinsi Jambi	100 %	APBD Prov. Jambi	137.687.536
TOTAL ANGGARAN						2.999.999.973

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN,

YAZIRMAN, SE, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19600222 199003 1 002

3000000000

27

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT atas berkah dan karunia-Nya, sehingga Rencana Kerja (Renja) Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi tahun 2015 dapat disusun sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Rencana Kerja (Renja) Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi tahun 2014 disusun dengan mengacu kepada Undang Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU-SPPN) yang telah dijabarkan secara teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Biro Pemerintahan Tahun 2015 merupakan salah satu tahapan dari Perencanaan Pembangunan Provinsi Jambi secara keseluruhan untuk periode 1 (satu) tahun yang menjadi bahan dalam penyusunan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2015.

Akhirnya penghargaan dan ucapan terima kasih yang tiada terhingga disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kerjasamanya sehingga tersusunnya Rencana Kerja Biro Pemerintahan Tahun 2015 ini. Kami menyadari Renja ini masih perlu penyempurnaan. Walau demikian, besar harapan semoga Renja ini bermanfaat sebagai upaya peningkatan kinerja pelaksanaan program pembangunan di masa mendatang. Demi kesempurnaan Renja ini untuk meningkatkan kinerja Biro Pemerintahan, kami menerima kritikan dan saran yang membangun.

Jambi, September 2014

**KEPALA BIRO PEMERINTAHAN
SETDA PROVINSI JAMBI**

YAZIRMAN, SE, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19600222 199003 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	2
1.4 Sistematika Penulisan Renja	3
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Biro Pemerintahan	4
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun	4
Lalu dan Capaian Renstra SKPD	5
2.2 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2015	11
Bab III Penutup	16
Lampiran	

